

Judul : Korupsi masif tuntutan terapi kejut
Tanggal : Senin, 24 Juli 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Korupsi Masif Tuntut Terapi Kejut

Berbagai reformasi dan digitalisasi tidak akan melahirkan perubahan yang mendasar, kecuali disertai kebijakan yang mengagetkan.

INDRIYANI ASTUTI

indriyani@mediaindonesia.com

MENTERI Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali melontarkan pernyataan kontroversial soal pemberantasan korupsi (PK). Ia meminta masyarakat tidak hanya menilai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari jumlah orang yang ditangkap.

"Itu kampungan, menurut saya kalau pemikiran itu *ndeso*," kata Luhut di sela acara diskusi Strategi Nasional (Stranas) PK di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (18/7). Kepemimpinan KPK di bawah Firli Bahuri dinilai telah cukup baik antara lain dengan adanya sistem digitalisasi yang bisa mengurangi potensi korupsi, seperti pengadaan dengan e katalog.

Namun, setelah memuji KPK, Luhut juga sempat menyampaikan pesimisme bahwa korupsi tidak mungkin diberantas habis. "Bilang habis korupsi itu bohong, nanti kau di surga saja," kata Luhut.

Pernyataan Luhut memuji KPK di tengah kinerja lembaga antirasuah yang disorot seperti jauh panggang dari api. Fakta dari hasil Transparency International (TI) pada 2022, skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia sebesar 34 dari 100 dan herada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor tersebut turun 4 poin dari 2021, menjadikan penurunan paling drastis sejak 1995.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Zaenur Rohman mengingatkan pencegahan dan penindakan tidak bisa dipisahkan dalam pemberantasan

Pernyataan Luhut memuji KPK di tengah kinerja lembaga antirasuah yang disorot seperti jauh panggang dari api.

korupsi. Ia menilai saat ini penindakan justru merupakan pencegahan paling efektif karena memberikan *shock therapy* (terapi kejut) atau pembelajaran bagi para pihak yang melakukan tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, ujarnya, korupsi di Indonesia masih sangat masif terjadi di berbagai sektor.

"Ini pernyataan yang kesckian kali, pernyataan Pak Luhut sangat berbahaya dan menunjukkan betapa problematiknya pemahaman dan spirit antikorupsi pejabat di Indonesia," ujar Zaenur, Sabtu (23/7).

Atas berbagai peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi, terang Zenur, tidak mungkin penegak hukum melakukan pembiaran dengan dalih berfokus pada pencegahan. Tanpa ada satu pemicu seperti OTT dalam penindakan korupsi, sangat sulit mendorong terjadinya perubahan sistem.

Apalagi, terang Zenur, dengan status *quo* sehingga para pejabat yang sangat nyaman di pucuk pemerintahan atau para penegakan hukum melakukan kerja biasa, ia menyakini tidak akan ada perubahan.

"Meskipun dicanangkan berbagai

reformasi dan digitalisasi, itu semua tidak akan melahirkan perubahan yang mendasar. Kebanyakan sekadar ada (program), perubahan mendasar justru akan terjadi ketika ada situasi yang mengagetkan dan *shock* di sebuah organisasi," paparnya.

Lecehkan hukum

Senada, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengatakan pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengedepankan pencegahan, tetapi juga harus berjalan beriringan dengan penindakan. Penindakan pun merupakan proses hukum yang dijamin peraturan perundang-undangan dan bermuara pada proses persidangan.

"Apakah yang ia (Luhut) maksud drama itu adalah proses hukum di hadapan persidangan? Jika itu yang ia maksud, Saudara Luhut telah melecehkan hukum," ujar Kurnia.

Kurnia lantas menyinggung situasi pemberantasan korupsi di Indonesia yang dinilai dalam fase mengkhawatirkan, terlihat dari merosotnya indeks IPK Indonesia. Selain itu, masyarakat melihat bahwa ada persoalan krisis integritas di tubuh KPK. "KPK yang Saudara Luhut banggakan itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Apa yang dibanggakan? Kualitas penindakan jeblok, kuantitasnya anjlok, rentetan pelanggaran kode etik, baik level pimpinan maupun pegawai, silih berganti," papar Kurnia.

ICW berharap para pejabat publik tidak melontarkan pernyataan yang kontroversial atau asal bicara yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap kondisi korupsi yang masif. (P-2)